



**PENGARUH KEKAYAAN SUMBERDAYA ALAM BATUBARA  
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**THE EFFECT OF COAL ABUNDANCE ON INCOME INEQUALITY  
IN EAST KALIMANTAN PROVINCE**

**Ahmad Zaini**

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III  
Lembaga Administrasi Negara  
Jl. HM. Ardans (Ringroad III) Samarinda  
Email: zainy\_mails@yahoo.com

Naskah diterima: 14 Agustus 2017, revisi 1: 24 Agustus 2017, disetujui: 30 Agustus 2017.

**Abstract**

*East Kalimantan Province is the largest producer of natural resources in Indonesia. Due to the massive exploitation process and high value, the mining sector has the biggest contribution and thus dominates the economy sector in the region. Related to this conditions, this study aims to describe the effect the effect of coal as natural resource on income inequality in East Kalimantan Province. This study uses panel data from nine districts/municipalities in East Kalimantan during 2006 until 2014, which is then processed by a pooled least square model.*

*The study concludes that the contribution of coal sub-sectors in the economy is positively related to income inequality. The higher the contribution of coal sub-sector in the economy, the higher the income inequality in East Kalimantan Province. In addition, this study also finds that local government expenditure is not significantly related to income inequality, which means that the local government has not succeeded in creating equal prosperity in that region. However, the economic growth and the contribution of agricultural sector have no significant effect on income inequality.*

**Keywords:** *income inequality, natural resources curse, government expenditure.*

**Abstrak**

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Akibat proses eksploitasi yang *massive* dan nilai yang tinggi, sektor pertambangan sangat mendominasi perekonomian daerah tersebut. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian. Terkait kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan sumber daya alambatubara terhadap



ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dari sembilan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2006-2014, yang kemudian diolah menggunakan model *pooled least square*.

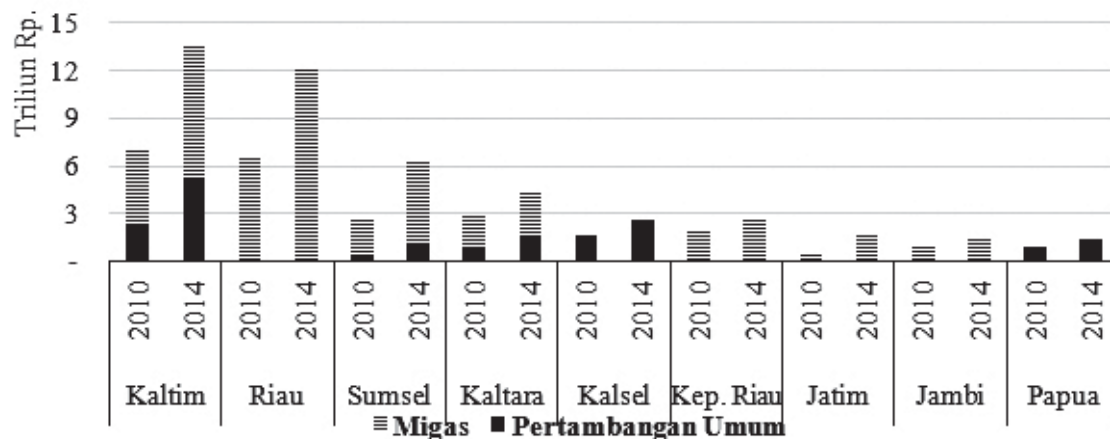
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian, semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan, yang berarti pemerintah daerah belum berhasil menciptakan pemerataan kesejahteraan di wilayahnya. Adapun pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

**Kata kunci:** ketimpangan pendapatan, kutukan sumber daya alam, pengeluaran pemerintah

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan sumber daya alam memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sebuah perekonomian. Dengan nilai yang tinggi, keberadaannya dapat mendorong standar kehidupan masyarakat dengan mendorong konsumsi publik dan swasta di level yang lebih tinggi. Keberadaan sumber daya alam juga dapat meningkatkan investasi, baik dari pendapatan sumber daya alam itu sendiri maupun dari pinjaman yang dimungkinkan berkat pendapatan sumber daya alam. Selain itu, keberadaan sumber daya alam dapat mengatasi permasalahan besar dalam pembangunan, yaitu kurangnya sumberdaya fiskal untuk mendanai kepentingan publik. Pendapatan dari sumber daya alam umumnya sebagian besar masuk ke sektor publik, sehingga dapat menjadi sumber dana investasi publik dalam rangka pembangunan (Sach, 2007).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut terlihat dari bagi hasil sumber daya alam yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan provinsi lainnya, sebagaimana ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2010 Provinsi Kalimantan Timur menerima bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp. 6,97 triliun. Bagi hasil ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dimana Rp. 2,13 triliun bersumber dari pertambangan umum dan Rp. 4,84 triliun bersumber dari minyak dan gas bumi. Tahun 2014 kondisinya ternyata tidak berubah, Provinsi Kalimantan Timur tetap sebagai penerima bagi hasil sumber daya alam tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.



Sumber: Kemenkeu, 2016

Gambar 1.  
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Migas Tahun 2010 dan 2014

Sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Provinsi Kalimantan Timur mengekstraksi sumber daya alam yang ada karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Akibat proses eksploitasi yang *massive* dan nilai yang tinggi, sektor pertambangan beberapa tahun terakhir sangat mendominasi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPS(2016a), PDRB Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi yaitu mencapai Rp. 501 triliun pada tahun 2015, dimana 44,91% merupakan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian. Begitu dominannya peran sumber daya alam, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat sensitif terhadap gejolak yang terjadi di sektor pertambangan dan penggalian. Sebagai sektor yang mendominasi, gejolak di sektor pertambangan dan penggalian tentunya berdampak pada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu yang perlu dicermati adalah dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, mengingat kondisi perekonomian menggambarkan pendapatan setiap orang dalam perekonomian (Mankiw, 2000).

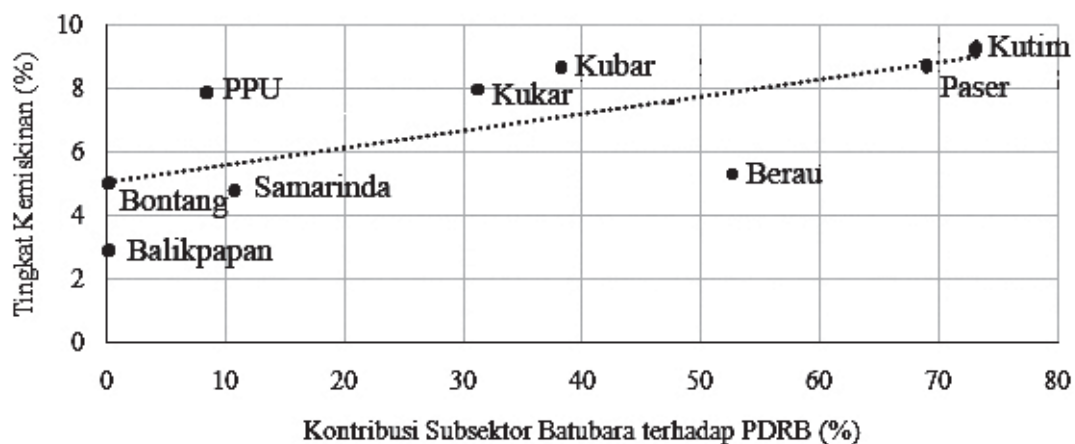
Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian. Selain itu sebarannya pun relatif merata, hampir semua kabupaten/kota memilikinya kecuali Kota Balikpapan dan Kota Bontang (BPPMD, 2013). Namun permasalahannya, sumber daya alam adalah sumber daya tidak dapat diperbaharui sehingga tidak dapat bertahan lama dan suatu saat akan habis. Dengan demikian penerimaan daerah dari sektor sumber daya alam sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan dalam jangka panjang, sehingga penggunaannya pun harus hati-hati dan mempertimbangkan kesiapan daerah ketika sumber daya alam tersebut berkurang atau habis (Wright & Czelusta, 2004). Merujuk pada data Badan Geologi Kementerian ESDM (2016), jumlah cadangan batubara di Indonesia pada tahun 2015 adalah 32,3 miliar ton, dengan rincian cadangan terkira mencapai 24 miliar ton dan cadangan terbukti sebanyak 8,3 miliar ton. Menggunakan cadangan terbukti yang memang layak untuk dieksploitasi, maka dengan rata-rata produksi 400 juta ton setiap tahunnya, jumlah cadangan batubara di Indonesia akan habis pada 20 tahun mendatang. Dengan demikian pada tahun 2036 Indonesia akan menjadi pengimpor batubara, jika tidak dilakukan upaya menaikkan volume cadangan batubara melalui kajian-kajian geologi.

Nilai yang tinggi dan jumlah yang cukup melimpah menjadikan komoditas batubara sebagai sumber pendapatan yang sangat menarik dan penting bagi daerah penghasil. Pendapatan dari batubara



selama ini juga terbukti mampu meningkatkan PDRB per kapita daerah penghasil batubara lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015 daerah penghasil batubara di Provinsi Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita yang cukup tinggi, kecuali Kota Bontang. Kondisi ini sebenarnya menggambarkan rata-rata kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah penghasil batubara tersebut cukup tinggi.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur memang relatif rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dimana tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 adalah 6,10% sedangkan tingkat nasional 11,13%. Namun ada fakta menarik terkait tingkat kemiskinan dan kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPS terlihat bahwasanya kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang subsektor batubaranya tinggi ternyata tingkat kemiskinannya juga tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup tinggi di wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam batubara. Kondisi ini membawa kita untuk berpikir kembali apakah keberadaan sumber daya alam, khususnya batubara, di Provinsi Kalimantan Timur selama ini membawa sebuah keberuntungan atau justru kutukan.



Sumber: BPS, 2016

Gambar 2.

Scatter Plots *Tingkat Kemiskinan dan Kontribusi Subsektor Batubara dalam Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015*

Keberadaan sumber daya alam dalam sebuah perekonomian masih menjadi bahasan menarik hingga saat ini. Ada anggapan bahwa dalam jangka panjang kekayaan sumber daya alam akan berdampak buruk pada perekonomian, namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Hasil penelitian Auty (1993) menyatakan sejak tahun 1960 kinerja perekonomian negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam lebih buruk dari negara-negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, ditandai dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi (Roy, Sarkar, & Mandal, 2013). Hipotesis ini didukung oleh penelitian Sach dan Warner (1995) yang menyimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kekayaan sumber daya alam pada tahun 1970-1990 di berbagai negara. Wright dan Czelusta (2004) memiliki pendapat yang berbeda yang menyatakan bahwa inti permasalahan ada pada ketidaktepatan mendefinisikan sumber daya alam. Menurut mereka sumber daya alam hendaknya didefinisikan sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, bukan sebagai rejeki atau keberuntungan yang dapat dinikmati, sehingga pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati. Permasalahannya bukan pada keberadaan sumber daya alamnya tetapi cenderung pada pengelolaannya, dimana hendaknya digunakan untuk mendukung perkembangan



ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi investasi jangka panjang yang mendukung pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Memang tidak ada jaminan bahwa sumber daya alam dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian. Namun dengan sumber daya alam yang dimiliki, beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk.

Beberapa penelitian terkait keberadaan sumber daya alam di Indonesia dan pengaruhnya terhadap perekonomian sebenarnya telah dilakukan. Diantaranya penelitian Komarulzaman dan Alisjahbana (2006), yang menyimpulkan bahwa subsektor pertambangan umum memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan subsektor kehutanan, minyak dan gas bumi, memiliki hubungan sebaliknya. Penelitian-penelitian tersebut tidak fokus pada keterkaitan antara kekayaan sumber daya alam batubara dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Kondisi ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kekayaan sumber daya alam batubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur.

## B. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2014. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran, mengkaji dan menguji keberadaan teori secara empirik dari variabel-variabel independen yang mempengaruhi suatu variabel dependen yang selanjutnya akan dianalisis pengaruh atau hubungan antara beberapa variabel tersebut berdasarkan data empirik dengan metode *explanatory research*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi BPS dan Kementerian Keuangan dengan bentuk data panel yang merupakan gabungan antara runtut waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*) sembilan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2014. Keuntungan menggunakan panel data yaitu dapat meningkatkan ukuran sampel atau populasi dan memperbesar *degree of freedom*, serta penggabungan informasi yang berkaitan dengan variabel *cross section* dan *time series*.

Dengan demikian dalam penelitian ini dapat dirumuskan model penelitian dengan persamaan sebagai berikut.

$$GINI_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 KSDA_{it} + \alpha_2 PDPK_{it} + \alpha_3 PDRBPK_{it} + \alpha_4 PERTA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

GINI : Koefisien gini

KSDA : Persentase nilai subsektor batubara terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku

PPD : Realisasi APBD per kapita bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

PDRBPK : PDRB per kapita atas dasar harga konstan

PERTA : Persentase nilai sektor pertanian terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku

## C. KERANGKA TEORI

### 1. Ketimpangan Pendapatan

Pembangunan memang memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun masalahnya





bukan hanya bagaimana membuat ekonomi tumbuh tetapi juga bagaimana hasil pertumbuhan ekonomi dapat terbagi lebih merata (Todaro & Smith, 2006). Tingginya tingkat pendapatan nasional tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk jika tidak terdistribusi secara merata atau timpang. Sebaliknya distribusi pendapatan yang merata juga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya jika tidak disertai dengan tingkat pendapatan nasional yang tinggi.

Ukuran ketimpangan pendapatan yang dikenal secara luas adalah koefisien gini, nilainya berkisar antara nol hingga satu, jika mendekati nol maka distribusi pendapatan semakin merata, dan jika mendekati satu maka distribusi pendapatan semakin tidak merata. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien gini sebesar 0 berarti terdapat pemerataan sempurna, sedangkan koefisien gini sebesar 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (Haughton & R. Khandker, 2012). Pemerataan sempurna menggambarkan kondisi dimana setiap orang memperoleh pendapatan yang sama persis, sedangkan ketidakmerataan sempurna menunjukkan kondisi dimana hanya satu orang memiliki/menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali.

Uraian tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata dapat diwujudkan bersamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun belum ada konsensus diantara para ahli ekonomi terkait hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, kecenderungan menabung kelompok orang kaya lebih besar dibandingkan dengan kelompok orang miskin. Sehingga tingginya tingkat ketimpangan pendapatan akan berdampak pada tingginya tabungan, akumulasi modal, dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya ahli ekonomi modern berpandangan bahwa tingginya tingkat ketimpangan pendapatan akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi melalui empat cara, yaitu investasi yang rendah, tingginya beban pajak, rendahnya investasi sumber daya manusia, serta tingginya aktifitas pemburu rente (Iradian, 2005).

Adapun Todaro & Smith (2006) menyatakan ada beberapa kerugian yang akan terjadi jika tingkat ketimpangan pendapatan dibiarkan tinggi. *Pertama*, ketimpangan pendapatan yang ekstrem akan menyebabkan inefisiensi ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang tinggi menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang merasakan keuntungan perekonomian, tingkat tabungan dalam perekonomian cenderung rendah sehingga mengurangi produktifitas, serta menyebabkan alokasi aset menjadi tidak efisien yang akhirnya akan semakin memperlebar kesenjangan. *Kedua*, ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Ketimpangan yang tinggi justru memperkuat kekuatan politis golongan kaya yang biasanya digunakan untuk mengarahkan berbagai hasil pembangunan untuk kepentingan mereka sendiri. *Ketiga*, akhirnya ketimpangan yang ekstrem akan menciptakan ketidakadilan, dimana orang-orang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Terkait dengan distribusi pendapatan, Simon Kuznets mengatakan bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk atau timpang, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik atau merata. Pendapat ini lah yang kemudian dikenal dengan kurva Kuznets "U-terbalik", karena perubahan longitudinal distribusi pendapatan tampak seperti kurva berbentuk U-terbalik. Pendapat ini sedikit mengubah pandangan buruk tentang ketimpangan, karena ketimpangan mungkin akan meningkat sementara waktu akibat hal-hal yang pada gilirannya akan membuat semua orang diuntungkan. Peralihan tersebut terkait dengan perubahan struktural dalam perekonomian, sehingga tahap-tahap awal pembangunan distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, namun kemudian membaik (Todaro & Smith, 2006).



## 2. *Natural Resource Curse Hypothesis*

Pengertian sumber daya alam sebenarnya merujuk pada seluruh kekayaan alam di bumi baik yang hidup maupun mati, tetapi umumnya istilah tersebut dibatasi dengan sumber daya dan sistem dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia (Howe, 1979). Berbagai macam sumber daya alam tersebut dikelola sedemikian rupa dan diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan pengertian ini, keberadaan sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia.

Namun demikian dalam kenyataannya, keberadaan sumber daya alam yang melimpah bukan jaminan menjadikan manusia hidup sejahtera. Sebesar apa pengaruhnya terhadap kesejahteraan manusia tergantung dengan bagaimana pengelolaannya (Wright & Czelusta, 2004). Keberadaan sumber daya alam dalam perekonomian masih menjadi bahasan yang menarik hingga saat ini, apakah berdampak positif terhadap perekonomian atau sebaliknya. Pertanyaan ini muncul karena berdasarkan hasil beberapa penelitian, keberadaan sumber daya alam yang melimpah tidak memiliki dampak yang positif, bahkan berdampak negatif terhadap perekonomian dalam jangka panjang.

Auty (1993) dalam buku yang berjudul "*Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*" menyatakan bahwa sejak tahun 1960 kinerja perekonomian negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam (Roy et al., 2013). Bahasan terkait kutukan sumber daya alam (*Natural Resource Curse Hypothesis*) ini kemudian dibuktikan secara empiris oleh Sach dan Warner (1995). Hasil penelitian mereka mengungkapkan fakta bahwa kekayaan sumber daya alam memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dijelaskan dalam penelitian tersebut, secara statistik negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam mengalami pertumbuhan ekonomi lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara yang miskin dengan sumber daya alam.

Kutukan sumber daya alam juga dapat dijelaskan menggunakan model Penyakit Belanda (*Dutch Disease*). *Dutch Disease* merujuk pada kondisi perekonomian Belanda pada tahun 1970-an, dimana pada saat itu sedang *booming* sektor sumber daya alam. Pada saat itu perekonomian difokuskan pada sektor sumber daya alam, sehingga faktor produksi dalam negeri, diantaranya buruh, akan terserap ke sektor tersebut karena memberikan tawaran upah yang lebih menarik. Konsekuensinya harga faktor produksi tersebut akan semakin tinggi, sehingga sektor lainnya akan sulit berkembang. Salah satunya adalah sektor manufaktur yang kalah bersaing disebabkan harga input atau faktor produksi yang cukup tinggi. Selain itu sektor manufaktur menjadi semakin tertekan karena apresiasi nilai mata uang domestik akibat *booming* sumber daya alam, sehingga harga produknya menjadi relatif lebih mahal di pasar internasional (Corden & Neary, 1982). Kondisi ini akhirnya akan menyebabkan proses de-industrialisasi di negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam.

Munculnya hipotesis kutukan sumber daya alam menunjukkan bagaimana sumber daya alam selama ini belum dikelola secara baik sehingga berdampak negatif pada perekonomian. Paling tidak ada empat alasan menurut Gylfason (2001) yang menyebabkan sumber daya alam gagal meningkatkan kesejahteraan manusia. *Pertama*, sektor sumber daya alam cenderung menggunakan tenaga kerja dan modal kualitas rendah. *Kedua*, negara yang kaya sumber daya alam cenderung *overconfident*. *Ketiga*, sumber daya alam dianggap sebagai aset yang paling penting sehingga melupakan akumulasi modal manusia. *Keempat*, negara dengan sumber daya alam yang melimpah relatif lebih besar melakukan kesalahan dalam mengalokasikan anggaran.

Meskipun secara empiris umumnya negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam pertumbuhan ekonominya lambat, namun demikian ada beberapa negara yang tidak mengalami hal



itu. Amerika Serikat, Norwegia, Peru, Brazil, dan Australia adalah beberapa contoh negara yang berhasil mengelola kekayaannya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian (Wright & Czelusta, 2004). Bahkan Amerika Serikat, Norwegia, dan Australia pada tahun 2016 masuk dalam kategori negara dengan penduduk berpendapatan tinggi (Bank Dunia, 2017).

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan standar kehidupan, ditandai dengan pendapatan yang terus meningkat serta konsumsi barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak dan beragam. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat menggambarkan pendapatan total setiap orang dalam sebuah perekonomian (Mankiw, 2000). Sedangkan Van den Berg (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan kesejahteraan manusia.

Di negara-negara berkembang pemerintah dihadapkan pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sebenarnya sama pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun selalu sulit untuk diwujudkan bersamaan. Adanya pergeseran struktural dalam perekonomian mendorong perubahan pendapatan relatif, sehingga selalu ada kemungkinan bahwa distribusi pendapatan akan menjadi kurang merata (Van den Berg, 2001).

Teori pertumbuhan yakin masalah kemiskinan akan teratasi dengan sendirinya melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Bahkan Kuznets berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan merupakan syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian awal pertumbuhan ekonomi tingkat kesenjangan ekonomi makin tinggi sampai pada tingkatan tertentu baru menurun (Sumedi & Supadi, 2004). Model Harrod Domar menunjukkan pentingnya peranan tabungan (*saving*) pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tabungan akan meningkatkan kapital stok, yang berarti tersedia dana untuk meningkatkan investasi yang akan memacu pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1999). Komponen masyarakat yang mampu menabung adalah kelompok orang kaya, sehingga pertumbuhan ekonomi hanya dapat dimotori oleh kelompok masyarakat yang mampu memupuk modal. Secara tidak langsung teori ini tidak mempermasalahkan ketimpangan pendapatan dalam perekonomian.

Dollar and Kray (2001) berpendapat bahwa rata-rata pendapatan masyarakat miskin sebanding dengan pendapatan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi pada umumnya menguntungkan setiap orang termasuk juga yang miskin. Tetapi Chenery (1974) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara yang belum berkembang mempunyai pengaruh yang kecil terhadap pengurangan kemiskinan. Pendapat Chenery kemudian didukung oleh Forsyth yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan globalisasi akan memperlebar perbedaan pendapatan sehingga menghentikan pengurangan kemiskinan (Adams, 2003).

Namun Todaro (1999) berpendapat pertumbuhan yang cepat dan penanggulangan kemiskinan bukanlah tujuan yang saling bertentangan. Sejumlah negara seperti Taiwan, Iran, dan Korea Selatan mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun distribusi pendapatan rakyatnya juga mengalami perbaikan. Mellor dalam Suryahadi et al. (2006) mengemukakan konsep *rural led strategy of growth*. Sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang mempekerjakan mayoritas populasi di negara-negara sedang berkembang, sehingga meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Dinyatakannya pula perlambatan pengurangan kemiskinan di Asia dan peningkatan kemiskinan di Afrika adalah hasil dari tidak diperhatikannya sektor pertanian oleh pemerintah dan lembaga bantuan asing.





#### 4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Pengeluaran Pemerintah

Menurut Musgrave dan Musgravedalam Bratakusumah (2002) penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, menjalankan paling sedikit tiga fungsi utama dalam pembiayaan publik yaitu, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dalam rangka menjalankan fungsi distribusi, pemerintah umumnya menggunakan instrumen transfer. Transfer bertujuan untuk pemerataan atau mengurangi ketimpangan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horisontal (antar daerah), memperbaiki eksternalitas spasial di perbatasan wilayah, mengarahkan prioritas pembangunan, dan mendorong lahirnya ide-ide baru dari daerah (Ulbrich, 2003).

Pelaksanaan transfer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan menurut Undang-undang tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara umum DBH dan DAU digolongkan ke dalam bentuk transfer tidak bersyarat (*unconditional transfer*), sedangkan DAK digolongkan ke dalam bentuk transfer bersyarat (*conditional transfer*).

DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Nilai yang tinggi serta porsi terbesar diberikan kepada daerah penghasil, kecuali minyak dan gas bumi, DBH Sumber Daya Alam selama ini menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Ditambah dengan sifat transfer yang tidak bersyarat, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas daerah.

Penggunaan DBH Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh alokasi pengeluaran pemerintah. Prinsip utama dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah adalah didasarkan pada kebutuhan mengatasi kegagalan pasar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki distribusi pendapatan guna mengurangi kemiskinan (Wilhelm & Fiestas, 2005).

Pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan melalui dua cara, yaitu meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan meningkatkan kesempatan orang miskin untuk berkontribusi pada proses pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sumber daya manusia dan pengurangan biaya transaksi. Namun umumnya yang digunakan selama ini adalah pengeluaran pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dimana pengurangan kemiskinan lebih mengharapkan pada dampak tidak langsungnya melalui pertumbuhan ekonomi. Sehingga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan menjadi tantangan dan permasalahan yang sangat penting bagi pemerintah dalam menentukan pengeluarannya (Wilhelm & Fiestas, 2005).

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

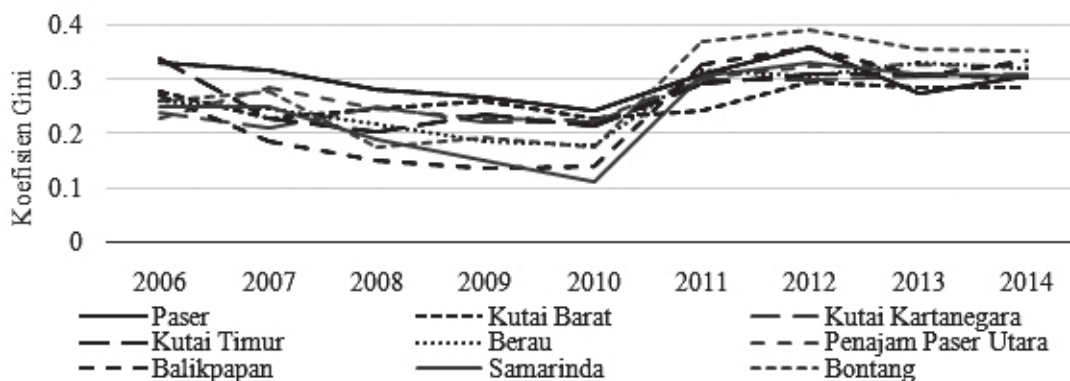
Perekonomian diupayakan untuk terus tumbuh dengan tujuan agar tingkat kesejahteraan masyarakatnya dapat meningkat. Seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat tergantung dengan besaran pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan pola distribusinya. Dua hal tersebut harus menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi akan berdampak kurang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan jika distribusi pendapatannya



tidak merata. Selain itu, distribusi pendapatan yang tidak merata jika dibiarkan akan memperlebar kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya dan berpotensi memicu konflik sosial di masa yang akan datang. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan dituntut untuk dapat menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dan hasilnya dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat agar tingkat kesejahteraan dapat meningkat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam batubara. Sumber daya alam tersebut tersebar relatif merata di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan sumber daya yang dimiliki ini pula, daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya membangun perekonomian mereka agar kesejahteraan masyarakatnya dapat meningkat. Apa yang dilakukan daerah-daerah tersebut cukup realistis mengingat dana yang diperlukan untuk pembangunan tidaklah sedikit, di sisi lain terdapat sumber daya alam batubara yang melimpah dengan nilai yang cukup tinggi. Saat ini yang menjadi perhatian adalah apakah sumber daya alam tersebut telah dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek lingkungan dan hasilnya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

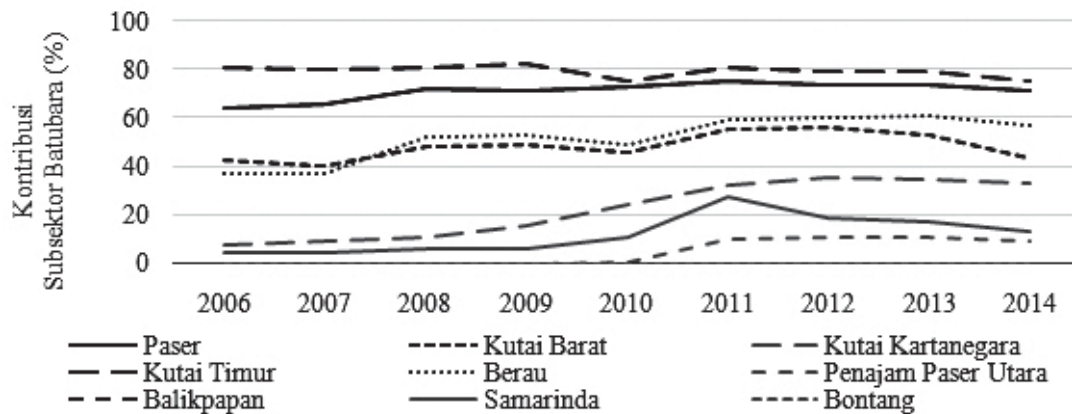
Tingkat ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3. Tingkat ketimpangan yang digambarkan dengan koefisien gini beberapa tahun terakhir memiliki pola yang hampir sama, yaitu cenderung menurun sebelum tahun 2010 dan cenderung meningkat setelah tahun 2010. Koefisien gini terendah terjadi di Kota Samarinda pada tahun 2010, adapun yang tertinggi terjadi di Kota Bontang pada tahun 2012.



Sumber: BPS, 2016

Gambar 3.  
Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2006-2014

Data yang digunakan untuk menggambarkan kontribusi sumber daya alam batubara terhadap perekonomian dalam penelitian ini adalah persentase nilai subsektor batubara terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Menurut Gambar 4., kontribusi subsektor batubara terhadap perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun terakhir sangat bervariasi, dimana ada yang cenderung meningkat, stabil, dan juga menurun. Tingkat kontribusinya pun berbeda-beda, ada yang tinggi, rendah, bahkan tidak sama sekali. Kontribusi subsektor batubara yang tertinggi adalah di Kabupaten Kutai Timur, dimana mencapai 82,70% pada tahun 2009. Sedangkan yang terendah adalah di Kota Balikpapan dan Kota Bontang, dimana kontribusinya adalah 0% sepanjang periode penelitian.

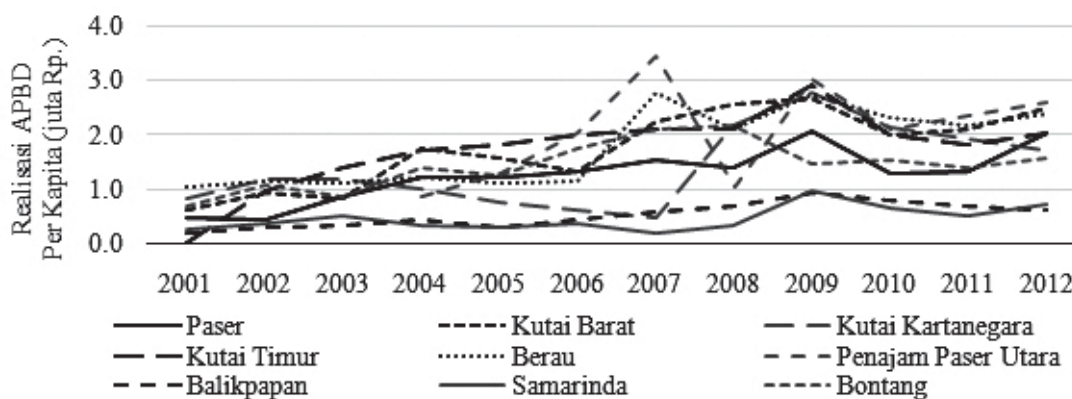


Sumber: BPS, 2016

Gambar 4.

Kontribusi Subsektor Batubara Terhadap Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2014

Variabel pengeluaran pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan data realisasi APBD per kapita bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi. Dari Gambar 5. dapat dilihat realisasi APBD bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun terakhir cukup berfluktuasi, meskipun sebagian besar mengalami peningkatan. Terlihat juga bahwasanya pada tahun 2010, realisasi APBD bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur secara riil mengalami penurunan. Namun demikian di tahun-tahun berikutnya realisasi APBD kembali mengalami peningkatan. Sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam, nilai APBD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memang cukup besar.



Sumber: World Bank, 2016

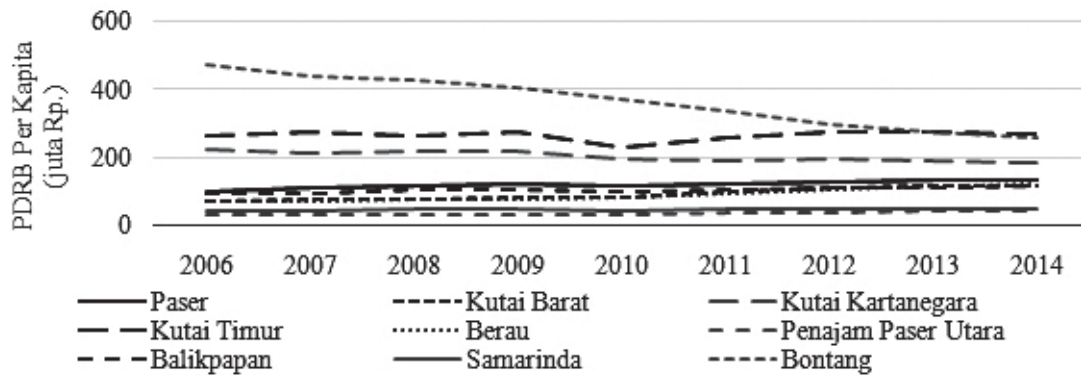
Gambar 5.

Realisasi APBD Per Kapita Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2012

Pendapatan per kapita dalam penelitian ini akan menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010, sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing individu yang tinggal di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. PDRB



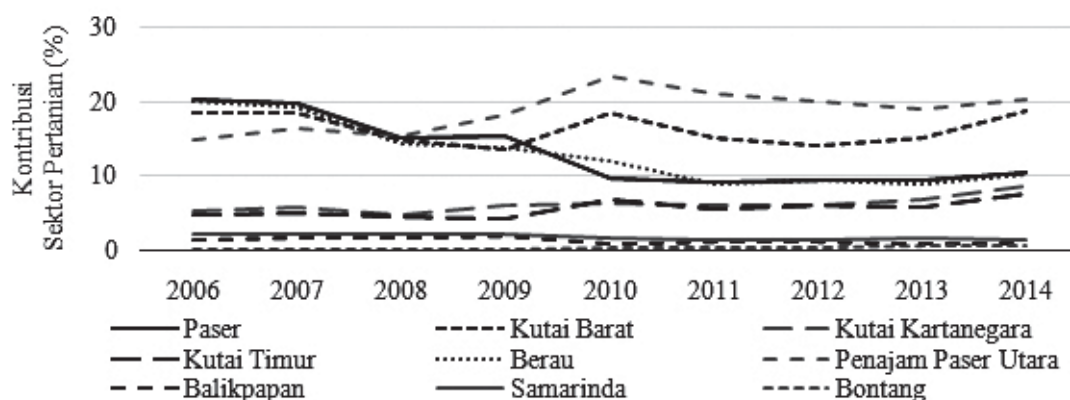
per kapita di Provinsi Kalimantan Timur relatif tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dari Gambar 6. dapat dilihat PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun terakhir ternyata cukup bervariasi, meskipun sebagian besar mengalami sedikit peningkatan. Terkecuali PDRB per kapita Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami penurunan, bahkan penurunan PDRB per kapita di Kota Bontang sangat tajam dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber: BPS, 2016

Gambar 6.  
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2014

Adapun peran sektor pertanian dalam perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur digambarkan dengan persentase nilai sektor pertanian terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Menurut Gambar 7. kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun terakhir ternyata cukup bervariasi, meskipun sebagian besar mengalami penurunan. Tingkat kontribusinya pun berbeda-beda, dimana kontribusi sektor pertanian tertinggi berada di Kabupaten Paser yang mencapai 25,52 % pada tahun 2004. Sedangkan kontribusi terendah berada di Kota Bontang, dimana kontribusinya kurang dari 0,06 % pada tahun 2008.



Sumber: BPS, 2016

Gambar 7.  
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2014



Hasil regresi model penelitian ini dengan menggunakan metode *Pooled Least Square*, dapat dilihat dalam Tabel 1. Hasil penelitian ini kembali mendukung penelitian-penelitian yang menyatakan adanya kutukan sumber daya alam (*resource curse*), dimana kekayaan sumber daya alam berdampak negatif terhadap perekonomian. Hasil sumber daya alam batubara yang cukup besar dan bernilai tinggi di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, ternyata tidak terdistribusi secara merata kepada penduduk di wilayah tersebut. Peningkatan kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian justru memperlebar kesenjangan antara masyarakat yang berpendapatan rendah dengan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Loayza & Rigolini (2016) di Peru, yang menyimpulkan pertambangan memperburuk distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan sektor pertambangan memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan penguasaan teknologi, karena tidak semua orang dapat menggunakan alat berat dan teknologi pertambangan lainnya.

Tabel 1.  
Daya Pengaruh Kekayaan Sumber Daya Alam Batubara Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Variabel Dependen: GINI		
Variabel Independen	Koefisien	t-hitung
KSDA	0,0005206 **	2,26
PPDPK-5	0,028542 ***	3,54
PDRBPK	-0,0000549	-0,67
PERTA	-0,0013085	-1,07
<i>R-sq</i>	0,2032	
<i>Obs</i>	67	
<i>Groups</i>	9	

Sumber: Data diolah

Keterangan:

Tingkat signifikansi 10% (\*); 5% (\*\*); dan 1% (\*\*\*)

GINI : Ketimpangan pendapatan

KSDA : Kekayaan sumber daya alam batubara

PPDPK-5 : Pengeluaran pemerintah daerah per kapita lima tahun sebelumnya

PDRBPK : Pendapatan per kapita

PERTA : Kontribusi sektor pertanian

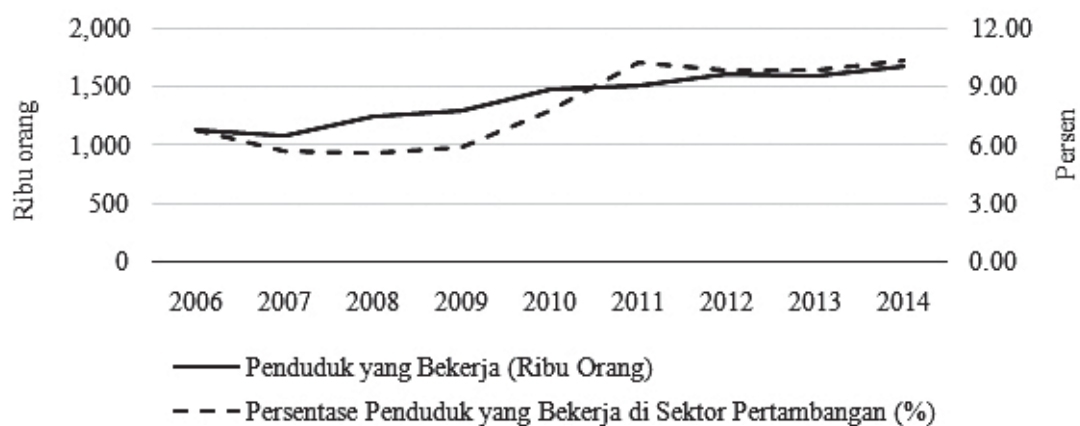
Kegiatan pertambangan memang menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, namun juga menarik tenaga kerja dari luar daerah khususnya untuk tenaga profesional. Dengan kualitas sumber daya manusia yang terbatas, sangat sedikit penduduk di sekitar daerah pertambangan yang dapat bekerja di sektor tersebut. Umumnya penduduk di sekitar hanya mampu menjadi tenaga kerja *unskilled* seperti *security*, *driver*, dan petugas administrasi. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3, dari total penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur, hanya 6-10 persen saja yang bekerja di sektor pertambangan. Kondisi ini berbeda jauh dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 50 persen. Sehingga tidak banyak pendapatan yang diperoleh masyarakat sekitar pertambangan, jika





dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan tambang. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan tingginya ketimpangan pendapatan karena hanya sebagian kecil penduduk di wilayah tersebut yang dapat merasakan keuntungan dari kegiatan pertambangan batubara.

Ross dalam Gamu et al. (2015) juga menyebutkan bahwa sektor pertambangan akan memperburuk ketimpangan pendapatan karena tenaga kerja dari sektor pertanian dan manufaktur tidak serta merta dapat terserap di sektor pertambangan yang sedang *booming*. Perubahan struktur ekonomi ini akan mengakibatkan pengangguran dan merubah pola distribusi pendapatan. Dalam kasus penelitian ini, pergeseran struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dari industri kayu lapis ke sektor pertambangan tidak serta merta dapat menyerap tenaga kerja yang ada karena sistem kerja industri kayu lapis dan pertambangan sangat berbeda. Diperlukan waktu untuk penyesuaian sehingga tenaga kerja dari industri kayu lapis dapat memenuhi kualifikasi sebagai tenaga kerja di sektor pertambangan.



Sumber: BPS, 2016

Gambar 8.

Persentase Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertambangan dan Total Penduduk yang Bekerja di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2014

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah per kapita di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lima tahun sebelumnya ternyata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun berpengaruh signifikan menurut perhitungan statistik, namun bukan berarti pemerintah daerah sebaiknya mengurangi pengeluarannya atau bahkan tidak melakukan belanja barang publik. Pengeluaran pemerintah tetap diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dan pemerataan distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini hanya mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur belum berhasil menjalankan salah satu fungsinya, yaitu fungsi distribusi. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, selama ini cenderung tidak berdampak pada pemerataan kesejahteraan penduduknya. Dengan kata lain pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, selama ini tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pengelolaan anggaran di daerah yang kaya dengan sumber daya alam ada kecenderungan bermasalah karena besarnya dana yang dikelola (Loayza & Rigolini, 2016). Besarnya anggaran yang dikelola mendorong terjadinya penyelewengan anggaran, serta tidak tanggap terhadap kepentingan publik (Gamu et al., 2015). Ada kemungkinan kondisi ini terjadi juga di Kalimantan



Timur, meskipun untuk pembuktiannya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Adanya program-program yang tidak tepat sasaran, dimana program yang disusun tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan berakibat pada program-program yang berjalan tidak memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara luas karena tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jalan di Provinsi Kalimantan Timur cenderung meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini tentunya peran pemerintah daerah sangat besar dalam penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut. Meskipun jumlahnya meningkat, sebaran fasilitas-fasilitas tersebut masih dianggap kurang merata. Fasilitas pendidikan dan kesehatan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Dari 1.536 dokter di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014, sebanyak 43,29 persennya berada di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, selebihnya tersebar di 8 kabupaten/kota lainnya. Adapun jalan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014, hanya 41,12 persen yang permukaannya aspal, selebihnya permukaan jalannya berupa kerikil, tanah, dan lainnya (BPS, 2015).

Pembangunan yang kurang merata ini bisa dianggap sebagai penyebab pengeluaran pemerintah berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Semenjak otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah berlomba-lomba untuk membangun daerahnya. Sebagai daerah yang baru membangun, pemerintah daerah akan cenderung melengkapi fasilitas publik di ibukota kabupaten/kota terlebih dahulu. Terlebih lagi dengan wilayah yang sangat luas, infrastruktur yang kurang baik, serta pemukiman penduduk yang tersebar di daerah-daerah terpencil menyebabkan pembangunan tidak dirasakan oleh mereka. Dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama untuk membuka akses ke daerah-daerah tersebut sehingga kesejahteraan dapat dirasakan merata oleh masyarakat.

Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini digambarkan dengan PDRB per kapita, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian ada kecenderungan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terkait dengan pemerataan kesejahteraan. Peningkatan PDRB per kapita yang berarti pertumbuhan ekonomi ternyata tidak berpengaruh pada distribusi pendapatan yang lebih baik atau lebih buruk. Hasil ini membantah pendapat Kuznets yang menyatakan ketimpangan pendapatan adalah syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *trickle down effect* tidak berjalan sempurna dalam perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Keuntungan dari pertumbuhan ekonomi ternyata tidak dapat memperbaiki tingkat kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin.

Pengaruh PDRB per kapita terhadap tingkat ketimpangan pendapatan yang tidak signifikan dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian sangat mendominasi perekonomian, sehingga sangat menentukan pertumbuhan ekonomi atau PDRB per kapita. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kontribusi sumber daya alam dalam perekonomian, khususnya subsektor batubara, berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu perlu diupayakan mengembangkan sektor lain untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki distribusi pendapatan, tetapi juga menyiapkan keberlangsungan perekonomian di masa datang saat sektor sumber daya alam telah habis.

Sektor pertanian yang dianggap penting dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat ternyata dalam penelitian ini menunjukkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat



ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kecilnya kontribusi serta kurang berkembangnya sektor pertanian menjadi penyebab mengapa sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.

Kurang berkembangnya sektor pertanian di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya disebabkan oleh lahan pertanian yang cenderung menurun (BPS, 2016b). Banyak lahan pertanian yang telah dikonversi menjadi wilayah pertambangan dan juga pemukiman. Masih terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, masyarakat di wilayah pertambangan cenderung berfikir pragmatis ketika tanahnya akan dibeli oleh perusahaan tambang. Masyarakat di wilayah pertambangan yang sebagian besar adalah petani akan menjual tanahnya dengan harapan mendapatkan uang yang banyak, tanpa berfikir ke depan dari mana mereka akan mendapatkan sumber penghasilan. Selain itu aktifitas pertambangan seringkali merusak lahan pertanian masyarakat sekitar, khususnya di waktu musim penghujan dimana limbah pertambangan ikut larut dengan air. Lahan pertanian di sekitar wilayah tambang akan menjadi tidak produktif, sehingga pendapatan petani menjadi berkurang. Kondisi ini pula yang menyebabkan para petani di sekitar tambang menjual tanah mereka.

Selain itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi program unggulan pemerintah daerah ternyata belum mampu berkontribusi banyak pada perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Baru dimulainya program tersebut serta belum lengkapnya infrastruktur pendukung mengakibatkan perkebunan kelapa sawit belum bisa berkembang dengan baik, sehingga masih belum bisa berkontribusi banyak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait hal tersebut dan berdasarkan hasil penelitian ini, maka implikasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Pertama*, membatasi eksploitasi sumber daya alam, khususnya batubara, karena akan berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Penggunaan sumber daya alam dalam perekonomian memang suatu dilema, di satu sisi diperlukan untuk menggerakkan perekonomian, namun di sisi lain berdampak buruk terhadap distribusi pendapatan dan juga lingkungan. Oleh karena itu penggunaannya pun harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak negatifnya serta ketersediaannya untuk generasi yang akan datang. Maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membatasi kegiatan pertambangan batubara dengan tidak menerbitkan ijin pertambangan baru sembari membangun sektor sekunder dan tersier agar lebih produktif, sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian yang baru serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

*Kedua*, memperbaiki alokasi belanja pemerintah karena setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seharusnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, selama ini terbukti belum mampu memperbaiki kesenjangan ekonomi masyarakatnya. Maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memperbaiki alokasi belanja dengan mengevaluasi kembali program-program yang telah dijalankan, apakah berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas atau tidak. Perbanyak program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur dapat diturunkan. Selain itu perlu dilakukan upaya pemerataan pembangunan oleh pemerintah daerah dengan cara membuka akses ke daerah-daerah terpencil dan membangun fasilitas publik disana. Hal tersebut penting dilakukan mengingat daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yang cukup luas disertai dengan kondisi infrastruktur yang kurang baik.



*Ketiga*, menjaga perekonomian daerah tetap tumbuh agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Meskipun dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemerataan pendapatan, namun ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan cenderung dapat berjalan beriringan di Provinsi Kalimantan Timur. Maka pemerintah daerah harus mendorong perekonomian di daerahnya agar terus tumbuh, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu perlu dipertimbangkan pula membuat basis pertumbuhan dari sektor non sumber daya alam. Selain tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, sumber daya alam juga berdampak negatif terhadap pemerataan pendapatan.

*Keempat*, Mengembangkan sektor pertanian agar lebih produktif sebagai alternatif basis pembangunan di masa yang akan datang. Meskipun dalam penelitian ini sektor pertanian tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemerataan pendapatan, namun ada kecenderungan sektor pertanian dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar bekerja di sektor pertanian, sehingga menjadikan sektor tersebut sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Maka pemerintah daerah perlu mendorong sektor pertanian agar berorientasi pada pasar dan industri sehingga lebih produktif. Peningkatan produktifitas sektor pertanian akan berdampak signifikan pada perbaikan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Program perkebunan kelapa sawit tetap perlu dikembangkan dengan membangun infrastruktur pendukungnya sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam perekonomian.

## **E. PENUTUP**

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia, khususnya batubara. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan sumber daya alam batubara serta pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur berdampak negatif pada distribusi pendapatan. Kenaikan kontribusi subsektor batubara dalam perekonomian akan berpengaruh pada distribusi pendapatan yang semakin timpang. Terlepas dari dampak positif dan negatifnya, perlu ada pembatasan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dengan tidak menerbitkan ijin pertambangan baru demi kemaslahatan generasi sekarang dan generasi di masa yang akan datang.

Pengeluaran pemerintah daerah dibidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ternyata memiliki dampak negatif pada distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini mengindikasikan pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum mampu memperbaiki pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Perlu dilakukan evaluasi terkait alokasi pengeluaran pemerintah daerah agar dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selain itu ditemukan pula bahwa PDRB per kapita dan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun tidak berpengaruh signifikan, pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor pertanian tetap perlu dijaga dan ditingkatkan karena ada kecenderungan berdampak positif pada distribusi pendapatan.



Dalam rangka penyempurnaan hasil penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang membahas secara lebih mendalam dan spesifik terkait alokasi pengeluaran pemerintah daerah dan dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur mengingat alokasinya yang cukup banyak dan beragam, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. H. (2003). *Economic Growth , Inequality , and Poverty: Findings from a New Data Set* (No. 2972). Washington DC.
- Badan Geologi. (2016). *Executive Summary Pemutakhiran Data dan Neraca Sumber Daya Energi Tahun 2015*. Bandung.
- Bank Dunia. (2017). *Country Classification*. Diperoleh 25 September 2017 dari <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries>
- BPPMD. (2013). *Peluang Investasi Mengenai Prospek Investasi Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara Cair di Kalimantan Timur*. Samarinda: BPPMD Kaltim.
- BPS. (2015). *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- BPS. (2016a). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- BPS. (2016b). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Bratakusumah, D. S. (2002). Kompetensi Aparatur dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1*(No. 1), 91–101.
- Corden, W. M., & Neary, J. . (1982). Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy. *The Economic Journal, Vol. 92*(No. 368), 825–848.
- Gamu, J., Billon, P. Le, & Spiegel, S. (2015). The Extractive Industries and Poverty: A Review of Recent Findings and Linkage Mechanisms. *The Extractive Industries and Society, Vol. 2*(No. 1), 162–176.
- Gylfason, T. (2001). Natural Resources, Education, and Economic Development. *European Economic Review, Vol. 45*, 847–859.
- Haughton, J., & R. Khandker, S. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Howe, C. W. (1979). *Natural Resources Economics: Issues, Analysis, and Policy*. New York: John Wiley & Sons.
- Iradian, G. (2005). *Inequality, Poverty, and Growth/ : Cross-Country Evidence* (No. 28). Washington DC.





- Kementerian Keuangan. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07/2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014*. Jakarta.
- Komarulzaman, A., & Alisjahbana, A. S. (2006). *Testing the Natural Resource Curse Hypothesis in Indonesia/ : Evidence at the Regional Level*. Bandung.
- Loayza, N., & Rigolini, J. (2016). The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality/ : Evidence from the Commodity Boom in Peru. *World Development*, Vol. 84, 219–234.
- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makro Ekonomi*. (Y. Sumiharti, Ed.) (Edisi Keempat). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Roy, B. C., Sarkar, S., & Mandal, N. R. (2013). Natural Resource Abundance and Economic Performance. *Current Urban Studies*, Vol. 1(No. 4), 148–155.
- Sach, J. D., & Warner, A. M. (1995). *Natural Resource Abundance and Economic Growth* (No. 5398). Massachusetts.
- Sach, J. D. (2007). How to Handle the Macroeconomics of Oil Wealth. *Escaping the Resource Curse*. Columbia University Press.
- Sumedi, & Supadi. (2004). *Kemiskinan di Indonesia: Suatu Fenomena Ekonomi* (No. 21). Bogor.
- Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2006). *Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Sectoral Components*. Jakarta.
- Todaro, M. P. (1999). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi Keenam). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. (H. Munandar, Ed.) (Edisi Kesembilan). Jakarta: Penerbit Erlangga.



- Ulbrich, H. H. (2003). *Public Finance in Theory and Practice*. Ohio: South-Western.
- Van den Berg, H. (2001). *Economic Growth and Development*. McGraw-Hill Irwin.
- Wilhelm, V., & Fiestas, I. (2005). *Exploring the Link Between Public Spending and Poverty Reduction: Lessons from the 90s*. Washington DC.
- Wright, G., & Czelusta, J. (2004). The Myth of the Resource Curse. *Challenge*, Vol. 47(No. 2), 6–38.